

Bappebti Blokir 1191 Entitas Tak Berizin Sepanjang 2020

Tanggal : Selasa , 19 Januari 2021
Media : Liputan6.com
Halaman : 1
Wartawan : Maulandy Rizky Bayu Kencana
Muatan Berita : Positif
Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*), M. Syist (*Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti*)
Rubrik : Bisnis
Topik : Blokir Entitas Ilegal

Bappebti Blokir 1191 Entitas Tak Berizin Sepanjang 2020

2021, 19 Jan, 10:01 WIB

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI

MINISTRY OF TRADE

LENGKAPAN, Jakarta. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menandatangani 1.191 surat perintah pemblokiran terhadap entitas tak berizin sepanjang tahun 2020. Pemblokiran ini hanya saja dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian serta perusahaan tempat pendaftaran bursa di Indonesia.

Kepala Bappebti Sidharta Utama mengatakan, Bappebti secara rutin melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka untuk melindungi masyarakat dari tindakan penipuan/kecurangan melalui transaksi perdagangan berjangka yang tidak berizin.

BIKAS UJUK
 Menteri Perdagangan, M. Syist menegaskan bahwa tindakan dengan ketentuan "Tindakan mengizinkan juga diarahkan secara maksimal terhadap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka yang memiliki izin dari Bappebti," ujar Sidharta dalam konferensi pers, Selasa (18/1/2021).

Jumlah pemblokiran tahun 2020 meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018, Bappebti telah menandatangani 103 surat perintah, tahun 2019 sebanyak 181 surat perintah, dan tahun 2020 sebanyak 107 surat perintah.

Pengawasan ini merupakan prosedur Covid-19 baik pengawasan Bappebti untuk melindungi kegiatan perdagangan berjangka komoditi tak berizin.

Sidharta mengatakan, di 2020 hingga sekarang dunia berhadapan dengan Covid-19. Kondisi ini mengakibatkan ekonomi melambat dan semakin memburuk. Situasi ini berdampak signifikan terhadap pasar keuangan global yang mengakibatkan nilai tukar rupiah terus mengalami penurunan. Kondisi ini berdampak pada aktivitas perdagangan berjangka komoditi yang mengakibatkan kerugian bagi pedagang berjangka di luar Indonesia yang pada akhirnya tidak dapat mempertahankan kerugian.

"Kelebihan transaksi tidak legal melahirkan tingkat di tingkat masyarakat, terutama di saat ini," ujar Sidharta.

Bagi pihak yang telah melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi wajib mendapatkan izin dari Bappebti sejak awal dan dapat berhadapan dengan ketentuan perdagangan berjangka yang berizin di Indonesia.

"Terdapat pihak yang melakukan transaksi berjangka dan melanggar ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Pihak ini akan ditindak secara tegas berdasarkan ketentuan hukum Indonesia dan akan menerima sanksi administratif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya.

LIPUTAN6.com DONASI ORANG BAIK BARUAT GEMPA SULAWESI BARAT

Donasi Orangbaik Barurak Gempa Sulawesi Barat

Rp 5.655.131

44 Donasi

28 hari lagi

Donasi Selesai

2 dari 3 halaman

Modus Penipuan

Wartawan: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Persekutuan Bappebti M. Syist menjelaskan, berdasarkan hasil pengawasan dan pengamatan melalui tim inspeksi perdagangan berjangka komoditi yang sering dilakukan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Penipuan, penipu akan meminta korban dengan janji akan memberikan keuntungan yang fantastis, penipu akan meminta korban untuk melakukan transaksi dengan mereka melalui rekening bank pribadi mereka.

2. Modus penipuan lainnya yang sering dilakukan adalah meminta korban untuk melakukan transaksi dengan mereka melalui rekening bank pribadi mereka.

3. Modus penipuan lainnya yang sering dilakukan adalah meminta korban untuk melakukan transaksi dengan mereka melalui rekening bank pribadi mereka.

4. Modus penipuan lainnya yang sering dilakukan adalah meminta korban untuk melakukan transaksi dengan mereka melalui rekening bank pribadi mereka.

5. Modus penipuan lainnya yang sering dilakukan adalah meminta korban untuk melakukan transaksi dengan mereka melalui rekening bank pribadi mereka.